



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RAPIUDDIN THAHIR**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN**
3. NHK : **196222**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 870.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/180 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 131.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 54.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	603.061.833
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.658.661.833
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.658.661.833

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.